PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

Jakarta, 19 Februari 2025

ADDRESS OF THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT
AT THE ANNUAL REPORT SPECIAL SESSION
OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 2024

Jakarta, 19th February 2025

Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas

With Integrity Comes A Quality Judiciary

PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

Jakarta, 19 Februari 2025

ADDRESS OF THE CHIEF JUSTICE
OF THE SUPREME COURT AT THE ANNUAL REPORT
SPECIAL SESSION OF THE SUPREME COURT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 2024

Jakarta, 19th February 2025

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI
Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam kebajikan.

- Yang Kami Hormati dan Kami Muliakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto;
- Yang Kami Hormati dan Kami Muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, B.Sc.;
- Yang Kami Hormati Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
- Yang Mulia Para Pimpinan Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat yaitu:
  1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi, Yang Mulia Najm Bin Abdullah Zaid beserta delegasi;
  2. Wakil Ketua Dewan Peradilan Agung Negara Kuwait, Yang Mulia Shaleh Rasyid Salim Al-Raqdan beserta delegasi;
  3. Wakil Ketua Dewan Peradilan Agung Negara Qatar, Yang Mulia Ahmed Ali H.B. Al Binali beserta delegasi;
  4. Wakil Ketua Federal Circuit and Family Court of Australia, Yang Mulia Patrizia Mercuri beserta delegasi;
  5. Wakil Ketua Mahkamah Agung Laos, Yang Mulia Khoun Phasouk beserta delegasi;

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Good morning.
Good tidings to us all.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam kebajikan.

- His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, General (Ret.) Prabowo Subianto;
- His Excellency, Vice President of the Republic of Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, B.Sc.;
- Distinguished Heads of High State Institutions;
- Distinguished Leadership of the Supreme Court of Friendly Countries, namely:
  1. Deputy Chief Justice of the Supreme Court of the Kingdom of Saudi Arabia, the Honorable Najm Bin Abdullah Zaid and delegation;
  2. Deputy Chief Justice of the Supreme Council of Kuwait, the Honorable Shaleh Rasyid Salim Al-Raqdan and delegation;
  3. Deputy Chief Justice of the Supreme Council of Qatar, the Honorable Ahmed Ali H.B. Al Binali and delegation;
  4. Deputy Deputy Chief Judge of the Federal Circuit and Family Court of Australia, the Honorable Patrizia Mercuri and delegates;
  5. Deputy Chief Justice of the Supreme Court of Laos, the Honorable Khoun Phasouk and delegates;

6. Hakim Agung Federal Court of Australia, Yang Mulia Darren Jackson beserta delegasi;
7. Hakim Agung Mahkamah Agung Singapura, Yang Mulia S. Mohan; dan
8. Hakim Agung Mahkamah Agung Brunei Darussalam, Yang Mulia Haji Abdullah Soefri;

- Yang Kami Hormati Para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

- Yang Kami Muliakan Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Para Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional, dan Para Mitra Pembaruan Mahkamah Agung;
- Yang Kami Muliakan Para Purnabakti, Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Hakim Tingkat Banding dan Para Hakim Tingkat Pertama seluruh Indonesia;
- Yang Kami Hormati Para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia;
- Yang Kami Hormati Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta jajaran;
- Yang Kami Hormati Para Pimpinan Redaksi, Para Jurnalis, dan Para Wartawan dari Media Cetak, Media Elektronik, dan Media *Online*; dan
- Seluruh warga peradilan, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, serta hadirin sekalian yang Saya hormati dan Saya banggakan.

6. Justice of the Federal Court of Australia, the Honorable Darren Jackson and delegation;
7. Chief Justice of the Supreme Court of Singapore, the Honorable S. Mohan; and
8. Justice of the Supreme Court of Brunei Darussalam, the Honorable Haji Abdullah Soefri;

- Distinguished Ministers of the Red-White Cabinet, Commander of the Indonesian Armed Forces, Attorney General, and Chief of National Police of the Republic of Indonesia;
- Excellencies, Ambassadors of Friendly Countries, Heads of International Agencies, and Reform Partners of the Supreme Court;

- Honorable Retired Justices and Judges, Leadership of the Supreme Court, Justices, Appellate Judges and Judges of the First Instance Courts Throughout Indonesia;

- Distinguished Rectors and Heads of Higher Education Institutions Throughout Indonesia;
- Distinguished Chairperson of Dharmayukti Karini and Chairperson of Dharmayukti Karini of the Supreme Court and staff;

- Distinguished editors in chief, journalists, and reporters of the printed media, electronic media, and online media; and

- All members of the judicial community, both who are attending in person as well as by online means, from Sabang to Merauke, from Miangas to the Rote island, distinguished guests, ladies and gentlemen.

Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada Sidang Istimewa, dengan agenda tunggal penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024.

As people of faith, let us express our gratitude for the blessing of Allah Swt., the One Supreme God, who has granted us good health allowing us to be hear at this Special Session, with the sole agenda of presenting the 2024 Annual Report of the Supreme Court.

Laporan Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sebagai lembaga yudikatif, yang didalamnya terdapat informasi mengenai keadaan terkini, capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, dan inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024.

The Annual Report constitute a form of accountability of the Supreme Court and the subordinate courts as judicial institutions, containing information on the current situation of the organization, its performance, challenges faced, and innovations made by the Supreme Court during 2024.

Pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 ini, tema yang diusung adalah "Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas". Tema ini mengandung makna **peradilan yang berkualitas hanya dapat dicapai dengan integritas yang tertanam dalam sanubari.**

The 2024 Annual Report carries the theme of "With Integrity, a Quality Judiciary". The theme implies the concept that a **quality judiciary can only be manifested through integrity imbedded deep within**.

Bapak Presiden dan hadirin yang Saya muliakan,

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki beberapa fungsi, yaitu: fungsi mengatur, fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administatif, dan fungsi lainnya. Saya akan menyampaikan Laporan Tahunan berdasarkan fungsi-fungsi tersebut.

Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen,

The Supreme Court as a judicial institution, mandated as such by the state's laws and regulations, carries a number of functions: regulatory, judicial, supervisory, advisory, administrative, and other functions. I will present the Annual Report by such functions.

FUNGSI MENGATUR

Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan

REGULATORY FUNCTION

The Supreme Court has been conferred with the authority to further regulate aspects required for the administration of justice. As

peradilan. Sebagai pelaksanaan fungsi tersebut, sepanjang tahun 2024 Mahkamah Agung telah menerbitkan 2 peraturan, yaitu:

Pertama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini sebagai respons terhadap paradigma baru sistem pemidanaan yang menyelaraskan kepentingan pemulihan korban dan pertanggung jawaban terdakwa. Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum penerapan *restorative justice*, terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan.

Kedua, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ketentuan ini merupakan respons terhadap penyempurnaan regulasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah, sehingga memperkuat sisi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pemilik hak atas tanah yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum.

Selain menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung, untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran, Keputusan, hingga menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga yang terkait.

an institution tasked with implementing this function, throughout 2024 the Supreme Court has issued two regulatory instruments:

Firstly, Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 on Guidelines to Adjudicate Criminal Cases Based on Restorative Justice Principle. The regulation was issued in response to a new paradigm for the sentencing system that aligns the need to rehabilitate the victim and the criminal accountability of the defendant. The Supreme Court addresses such gap in the implementation of restorative justice, specifically with regard to types of cases, requirements, and procedure for the implementation of the method at the trial level.

Second, Supreme Court Regulation No. 2 of 2024 on the Second Amendment to Supreme Court Regulation No. 3 of 2016 on Procedures for Filing Objections and Depositing Compensation to the District Court in Land Acquisition for Development in the Public Interest. This provision is in response to regulatory improvements introduced by the Government, thus strengthening legal certainty, fairness, and benefit for the land owners affected by development for public interest.

In addition to issuing the Supreme Court Regulation, in order to manifest the principle of an expeditious, simple and low-cost judicial process, the Supreme Court has also issued various circulars and decrees and engaged in cooperation with the relevant ministries and institutions.

FUNGSI PERADILAN

Bapak Presiden dan hadirin yang Saya muliakan,
Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi tersebut, Saya akan menyampaikan kinerja penanganan perkara, sebagai berikut:

Beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 31.138, terdiri dari perkara masuk sebanyak 30.991, ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147. Jumlah tersebut meningkat 13,18% dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 27.512 perkara.

Beban perkara yang meningkat tersebut ditangani oleh 45 orang Hakim Agung. Untuk perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) penanganan perkara selain oleh Hakim Agung juga oleh Hakim *Ad Hoc* yang berjumlah 9 orang terdiri dari 4 Hakim *Ad Hoc* Tipikor dan 5 Hakim *Ad Hoc* PHI, sehingga rerata beban kerja tiap hakim agung dalam satu tahun adalah 2.076 berkas perkara.

Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara sebanyak 30.908. Jumlah ini meningkat 12,95% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 27.365 perkara. Dengan data tersebut, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2024 mencapai 99,26%. Data tersebut menunjukkan jumlah perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2024 kurang dari 1%, atau

JUDICIAL FUNCTION

Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen,
The Supreme Court is the State's supreme judicial body over the subordinate courts. With respect to the realization of such function, I will present to you the institution's case processing performance:

The caseload of the Supreme Court throughout 2024 was 31,138, consisting of 30,991 incoming cases, in addition to cases that were carried over from 2023, which numbered 147. The figure increased by 13.18% when compared to 2023, which saw 27,512 coming in.

The increased caseload was handled by 45 justices, making the average load of each justice. In addition to being handled by justices, Corruption and Industrial Relations cases were also handled by 9 ad hoc judges, with four corruption ad hoc judges and five industrial relations ad hoc judges, making the average caseload of each justice for one year to be at 2,076 case files.

Throughout 2024 the Supreme Court cleared 30,908 cases. This figure is an increase by 12.95% when compared to 2023, during the 27,365 cases were adjudicated. Based on this data, productivity rate in case adjudication in 2024 was at 99,26%. The data also shows that the number of cases that has not been cleared by the end of 2024 were less than 1%, specifically 0,74%. The Supreme Court has

hanya berjumlah 0,74%. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas angka 99% dan sisa di bawah 1% selama lima tahun berturut-turut **sebagaimana dilihat dalam tayangan**.

been able to maintain its productivity rate in adjudicating cases above 99% and its pending cases below 1% for five consecutive years **as can be seen on the screen**.

Selanjutnya, dari sisi ketepatan waktu memutus perkara, dari jumlah 30.908 perkara yang diputus pada tahun 2024, sebanyak 30.653 perkara atau 99,17% diputus kurang dari 3 bulan. Angka ketepatan waktu memutus perkara ini, meningkat 0,28% dari tahun 2023 yang berjumlah 98,89%.

Furthermore, in terms of the timeliness in case adjudication, of the 30,908 cases decided in 2024, 30,653 cases or 99.17% were decided within less than 3 months. Such timeliness in deciding cases increased by 0.28% from 2023 which was at 98.89%.

Kemudian dari sisi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung telah menyelesaikan minutasi perkara dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 31.162 perkara. Jumlah ini meningkat 9,64% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 28.422 perkara.

In terms of case clearance, the Supreme Court has finalized case documents, or *minutasi*, and sent copies of decisions to the requesting courts in relation to 31,162 cases. This number increased by 9.64% compared to 2023, which saw to 28,422 case documents finalized.

Dari keseluruhan perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju tersebut, sebanyak 30.070 perkara diselesaikan dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan atau 96,50%. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2024 meningkat 6,18% dari tahun 2023 yang berjumlah 90,32%. **Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.**

Of the total cases whose documents were finalized and sent to the referring court, 30,070, or 96.50%, of case documents were finalized in less than 3 months. The timeliness of case document finalization in 2024 increased by 6.18% from 2023, which was at 90.32%. **This achievement is so far the highest in the history of the Supreme Court.**

Bapak Presiden dan hadirin yang Saya muliakan,

Alhamdulillah, Mahkamah Agung berhasil beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, dengan menerapkan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali

Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen,

With gratitude to God the Almighty, the Supreme Court has successfully adapted to advancements in information technology by adopting a policy of electronic filing of

secara elektronik terhitung mulai 1 Mei 2024. Sampai akhir tahun 2024, perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik yang telah diputus sebanyak 6.277 dari total 6.379 yang diregistrasi atau sebesar 98,40%, dan juga telah meminutasi dan mengirim salinan putusan secara elektronik sebanyak 3.930 perkara.

Berdasarkan data di atas, baik jumlah perkara yang diputus, jumlah perkara yang diminutasi, rasio produktivitas memutus, ketepatan waktu memutus perkara, maupun ketepatan waktu minutasi perkara, seluruhnya **menunjukkan kenaikan kinerja dibandingkan tahun 2023.** Bahkan beberapa diantaranya, telah memecahkan rekor capaian kinerja tertinggi yang pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Bapak Presiden dan hadirin yang Saya muliakan,
Selanjutnya, Saya akan menyampaikan **kinerja Pengadilan Tingkat Banding** pada empat lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Beban perkara tahun 2024 sebanyak 58.205, terdiri dari perkara masuk sebanyak 44.859, ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 13.346. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus sebanyak 46.860. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebesar 80,56% atau meningkat sebesar 5,08% dari tahun 2023.

cassation and case review petitions as of 1st May, 2024. As of the end of 2024, electronically filed cassation and case review cases that have been adjudicated were 6,277 out of a total of 6,379 cases registered, or 98.40%, and 3,930 cases have had their documents finalized (minutasi) and the electronic copies of such decisions sent.

Based on the data above, the number of cases decided, the number of case documents finalized, productivity rate in case adjudication, timeliness in deciding cases, and the timeliness of case document finalization, **have all shown an increase in performance compared to 2023**. In fact, a number of such achievements have broken the record for the highest achieved in the previous years.

Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen,
I would like to know present the **performance of the Appellate Courts** of the four branches of the judiciary and the Tax Court, which is as follows.

Caseload in 2024 was 58,205, consisting of 44,859 incoming cases and 13,346 pending cases that were carried over from 2023. Of the overall number, 46,860 have been decided. As such, productivity rate in case clearance at the Court of Appeal and Tax Court is 80.56% or an increase by 5.08% from 2023.

Jumlah beban perkara tersebut ditangani oleh hakim tinggi berjumlah 1.252 orang. Untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial ditangani juga oleh Hakim *Ad Hoc* tingkat banding yang berjumlah 108 orang, sehingga tiap hakim menerima perkara rata-rata sebanyak 137 per tahun.

The above caseload was handled by 1.252 high judges. For Corruption Crime Cases and Industrial Relation Disputes cases also handled by 108 Ad Hoc Judges at the appellate level, so each judge received an average of 137 cases per year.

Sedangkan untuk kinerja **penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama** pada empat lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Meanwhile, performance in **case processing at the Courts of First Instance** within the four judicial branches is as follows:

Beban perkara tahun 2024 sebanyak 2.991.747, terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.927.815, ditambah sisa perkara tahun 2023 sebanyak 63.932. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus sebanyak 2.856.821, dan perkara yang dicabut sebanyak 61.804, sehingga sisa perkara pada tahun 2024 adalah sebanyak 73.122. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus di Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan adalah sebesar 97,56%.

Caseload of the first instance courts in 2024 was 2,991,747, consisting of incoming cases totaling 2,927,815, in addition to the pending cases from 2023 which totaled 63,932. Of this total, 2,856,821 cases were decided, and 61,804 cases were withdrawn, making the number of remaining cases in 2024 to be at 73,122. As such, the adjudication productivity rate of the Courts of First Instance within the four judicial branches was 97.56%.

Jumlah beban perkara tersebut ditangani oleh hakim tingkat pertama yang berjumlah 5.804 orang. Untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial ditangani juga oleh Hakim *Ad Hoc* tingkat pertama yang berjumlah 350 orang. Perbandingan jumlah hakim dan jumlah beban perkara menunjukan rerata beban perkara untuk setiap hakim tingkat pertama dalam setahun adalah 1.547 perkara. Tingginya beban kerja hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menunjukkan kekurangan jumlah hakim. Untuk mengatasi kekurangan hakim tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan izin dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal.

The above caseload was handled by 5,804 first instance court judges. Corruption and industrial relation cases were also adjudicated by 350 first instance court ad hoc judges. The ratio of judges to total caseload shows that the average caseload for each judge at the Court of First Instance in a year is 1,547 cases. The high workload of judges at the Courts of First Instance indicates a shortage of judges. To overcome the gap, the Supreme Court issued a dispensation that allows cases to be adjudicated by a sole judge.

Selain gambaran penanganan perkara secara umum, Saya juga akan menguraikan tentang kinerja **penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (*e-Court*)**, sebagai berikut:

In addition to the overview of the case processing situation, I will also elaborate on the performance of **case handling through the electronic court system (e-Court)**, as follows:

Pada tahun 2024, jumlah Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, dan Perkara Tata Usaha Negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 410.754, atau meningkat sebesar 30,84% dibandingkan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 410.738 perkara atau sebesar 99,99% telah berhasil disidangkan secara e-Litigasi.

In 2024, the number of civil cases, civil religious cases, and state administrative cases registered through the e-Court application at the Court of First Instance was 410,754, or an increase of 30.84% compared to 2023. Of this number, 410,738 cases or 99.99% have been successfully tried using e-Litigation.

Sementara itu, pada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah perkara yang telah didaftarkan melalui fitur upaya hukum banding secara elektronik sebanyak 10.764. Dari jumlah perkara yang terdaftar ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu yang berjumlah 2.354, sebanyak 10.166 perkara telah selesai diputus secara e-Litigasi.

Meanwhile, at the Appellate Courts, the number of cases that have been registered through the electronic appeal feature was 10,764. From the number of newly registered cases plus the pending 2,354 cases from the previous year, a total of 10,166 cases were adjudicated through e-Litigation.

Jumlah pengguna layanan *e-Court* sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 984.814, terdiri dari Pengguna Terdaftar dari kalangan advokat dan Pengguna Lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.

The number of e-Court service users until 31st December, 2024 was recorded at 984,814, consisting of Registered Users from among members of the bar and other individual users, government officials, legal entities, and incidental attorneys.

Data yang diuraikan di atas, menunjukkan akseptabilitas masyarakat terhadap sistem peradilan elektronik, yang juga dapat mendukung peradilan hijau (*green court*), yaitu konsep pengadilan yang ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

The data presented above shows the public's acceptability of the electronic court system, which can also support green court, which adopts the concept of environmentally friendly courts by reducing the use of paper.

Dengan asumsi beban perkara Mahkamah Agung rata-rata per tahun mencapai 28.000, maka potensi pengurangan kertas dapat mencapai 42 ton per tahun. Jika untuk memproduksi 1 ton kertas memerlukan 17 pohon, dan setiap produksi 1 lembar kertas memerlukan 13,5 liter air, maka setiap tahun Mahkamah Agung berkontribusi menyelamatkan 714 pohon dan 113.400.000 liter air.

With an assumed average caseload of the Supreme Court at 28,000, potential cut back on the use of paper could reach 42 tons per year. If to produce one ton of paper requires 17 trees, and to produce 1 sheet of paper requires 13.5 liters of water, then every year the Supreme Court contributes by saving 714 trees and 113,400,000 liters of water.

Bapak Presiden dan hadirin yang Saya muliakan,
Selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara melalui **mediasi dan diversi.**

Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen,
In addition to the achievements I have presented, the Supreme Court also continues to promote efforts to resolve cases through **mediations and diversions**.

Selama tahun 2024, terdapat 29.552 perkara yang berhasil didamaikan melalui mediasi, atau mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 11,97%, sedangkan untuk perkara tindak pidana anak yang berhasil menempuh proses diversi sebanyak 424 atau sebesar 42,57% dari jumlah perkara diversi yang diterima yaitu 996.

During 2024, there were 29,552 cases that were successfully reconciled through mediation, or an increase from 2023 by 11.97%, while for juvenile criminal cases that successfully went through the diversion process were 424 or 42.57% of the total number of diversion cases received, which was 996.

Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha, Mahkamah Agung juga terus mendorong penyelesaian perkara dengan nilai gugatan kecil melalui mekanisme **gugatan sederhana (***small claim court)*.

Meanwhile, in order to support the government's program for ease of doing business, the Supreme Court also continues to encourage the resolution of cases of small claim value through the **small claims court mechanism**.

Pada tahun 2024, perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan pengadilan negeri sebanyak 12.484 dan perkara gugatan

In 2024, the number of small claims cases successfully resolved by the district courts was 12,484, while the number of small claims

sederhana ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan pengadilan agama sebanyak 441.

under the sharia economy system that were successfully resolved by the religious courts was 441.

Pada layar berikut ini ditampilkan tingkat kepuasan publik terhadap putusan pengadilan, yang salah satunya diukur dari perbandingan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan, dengan jumlah perkara yang diputus oleh tingkat peradilan yang bersangkutan.

The following screen shows the level of public satisfaction with court judgments, which is measured among others by the ratio of the number of legal remedies filed at each judicial level to the number of cases decided by the relevant judicial level.

Di luar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), serta perkara perdata permohonan, selama tahun 2024 yang diajukan upaya hukum banding, tercatat sebanyak 30.217 perkara atau sebesar 5,09% dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut menunjukan bahwa, tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 94,91%.

Excluding cases tried through the expedited hearing procedure, traffic violation cases (traffic tickets), and civil petition cases, 30,217 cases were filed for appeal in 2024, or 5.09% of the total number of cases decided by the courts of first instance. This shows that the level of satisfaction of the parties with the decision of the courts of first instance was 94.91%.

Pada tingkat banding, perkara yang diajukan kasasi adalah sebanyak 20.370 perkara atau sebesar 62,67% dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat kepuasan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar 37,33%.

At the appellate level, cases filed for cassation totaled 20,370 cases or 62.67% of all cases decided by the appellate courts, indicating that the level of satisfaction of parties with decisions issued by the courts of appeal was 37.33%.

Sedangkan pada tingkat kasasi, putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 2.130 perkara, atau sebesar 10,39% dari keseluruhan putusan kasasi, sehingga tingkat kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar 89,61%.

Meanwhile, at the cassation level, decisions petitioned for case review numbered 2,130 cases, or 10.39% of the total cassation decisions, showing the level of satisfaction with cassation decisions to be at 89.61%.

Selanjutnya, Saya akan menyampaikan **kontribusi Mahkamah Agung terhadap keuangan negara**.

I will now discuss the **Supreme Court's contribution to State finance**.

Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali perkara pajak, telah menetapkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp15.140.928.659.410,20 (lima belas triliun seratus empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah dua puluh sen), dan USD 85.926.370,31 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dolar tiga puluh satu sen dolar amerika).

The Supreme Court, through case review decisions on a tax related cases, has determined that tax to be paid to the state was Rp15,140,928,659,410.20 (fifteen trillion one hundred forty billion nine hundred twenty-eight million six hundred fifty-nine thousand four hundred ten rupiah twenty cents), and USD 85,926,370.31 (eighty-five million nine hundred twenty-six thousand three hundred seventy dollars thirty-one cents).

Selanjutnya, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam mengadili perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer, selain menjatuhkan pidana, juga mewajibkan terdakwa membayar denda dan uang pengganti. Sepanjang tahun 2024 denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp87.252.033.728.063,00 (delapan puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh dua miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah).

Furthermore, the Supreme Court and the subordinate courts in adjudicating criminal, special criminal, and military criminal cases, aside from imposing criminal punishment, also order defendants to pay fines and restitution. Throughout 2024, fines and restitution that must be paid by defendants totaled Rp87,252,033,728,063.00 (eighty-seven trillion two hundred fifty-two billion thirty-three million seven hundred twenty-eight thousand sixty-three rupiah).

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah memberikan kontribusi bagi penerimaan keuangan negara yang berasal dari penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2024 senilai Rp75.143.960.113,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus tiga belas rupiah).

Additionally, the Supreme Court has also contributed to the state finance from non-tax state revenues collected in 2024 with a total value of Rp75,143,960,113.00 (seventy-five billion one hundred forty-three million nine hundred sixty thousand one hundred thirteen rupiah).

FUNGSI PENGAWASAN

Bapak Presiden dan hadirin yang Saya muliakan,
Aspek integritas merupakan kunci utama dalam membangun lembaga peradilan yang berkualitas. Hal ini menjadi pendorong bagi Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), melalui penguatan fungsi pengawasan.

Salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung untuk hal tersebut yaitu pada tahun 2024 Mahkamah Agung menunjuk 27 satuan kerja untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, 16 pengadilan diantaranya memenuhi syarat, sedangkan 11 lainnya belum memenuhi syarat.

Mahkamah Agung membuka berbagai kanal pengaduan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung. Jumlah pengaduan pada sistem tersebut sepanjang tahun 2024 tercatat 4.318. Sebanyak 4.146 pengaduan atau 96,02% telah selesai diproses, sedangkan sebanyak 172 pengaduan masih dalam proses penanganan.

Instrumen *reward and punishment* menjadi aspek penting dalam mewujudkan integritas. Berkaitan dengan ini, sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung telah menjatuhkan 244 sanksi disiplin, terdiri dari 94 sanksi berat, 41 sanksi sedang, dan 109 sanksi ringan.

SUPERVISORY FUNCTION

Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen,
Integrity is key in building a quality judicial institution. It is the driving force of the Supreme Court in making continuous improvement through the strengthening of its supervisory function.

One measure undertaken by the Supreme Court in this regard in 2024 was the appointment of 27 courts by the Supreme Court to implement the Anti-Bribery Management System, where 16 of which met the requirements, while the other 11 has yet to fulfill them.

The Supreme Court established various complaint channels that are integrated with the Supreme Court Supervisory Information System. The number of complaints received through system throughout 2024 was 4,318. A total of 4,146 complaints or 96.02% have been processed, while 172 complaints are still in the process of being handled.

The reward and punishment mechanism is an important aspect in reinforcing integrity. In this regard, throughout 2024, the Supreme Court has imposed 244 disciplinary actions, consisting of 94 severe sanctions, 41 moderate sanctions, and 109 light sanctions.

FUNGSI NASIHAT

Dalam rangka menjalankan fungsi memberikan nasihat atau pertimbangan, selama tahun 2024 Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan atas permohonan grasi sebanyak 66 dari total 67 pengajuan grasi. Pemberian pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara/pemerintah atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut fatwa juga diberikan kepada 35 permohonan yang diajukan oleh lembaga pemerintah.

ADVISORY FUNCTION

In order to carry out the function of providing advice or considerations, throughout 2024 the Supreme Court has given its considerations to 66 out of a total of 67 clemency applications. Advisements on legal matters to state institutions/the government, or considerations given in layperson language, which are also called *fatwas*, were also conveyed in response to 35 requests submitted by government institutions.

FUNGSI ADMINISTRATIF

ADMINISTRATIVE FUNCTION

Bapak Presiden dan hadirin yang Saya muliakan,

Mahkamah Agung sebagai kantor pusat dari badan peradilan yang berada di bawahnya, secara konsisten melakukan penguatan fungsi administrasi guna memastikan berjalannya tugas pokok dan fungsi. Penguatan tersebut meliputi penguatan sumber daya manusia, tata kelola keuangan, sarana-prasarana, dan tata kelola organisasi.

Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen,

The Supreme Court, as the central institution for the lower judicial bodies, consistently strengthens its administrative functions to ensure that its main duties and functions are being carried out. This includes the strengthening of human resources, financial governance, infrastructure, and organizational governance.

Pertama, Sumber Daya Manusia. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada tahun 2024 memiliki sumber daya berjumlah 32.652 orang, terdiri atas: hakim agung sebanyak 45 orang, hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung sebanyak 9 orang, hakim pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan sebanyak 7.378 orang, hakim *ad hoc* pengadilan tingkat pertama dan banding sebanyak 458 orang, tenaga kepaniteraan sebanyak 10.673 orang, dan tenaga non teknis lainnya sebanyak 14.089 orang.

Firstly, Human Resources. The Supreme Court and the subordinate courts in 2024 consists of 32,652 personnel, made up of 45 justices, nine ad hoc judges a the Supreme Court, 7,378 first instance and appellate court judges in the four branches of the judiciary, 458 ad hoc judges at the first instance and appellate courts, 10,673 registrars, and 14,089 other non-technical staff.

Pada tahun 2024, Mahkamah Agung mendapatkan tambahan aparatur peradilan sebanyak 14.216, yang terdiri atas Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4.940 dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 9.276. Namun, selama tahun 2024, Mahkamah Agung juga "kehilangan alamiah" 1.041 orang karena telah memasuki batas usia pensiun.

In 2024, the Supreme Court received an additional 14,216 judicial officers, consisting of 4,940 candidate civil servants and 9,276 candidate government contract employees. However, throughout the year the Supreme Court also "naturally lost" 1,041 people due to their entering the retirement.

Untuk mengingkatkan kapasitas dan kapabilitas hakim dan aparatur peradilan, sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 7.269 orang, yang meliputi kompetensi bidang teknis sebanyak 3.027 orang dan kompetensi bidang manajemen kepemimpinan sebanyak 4.242 orang.

To improve the capacity and capability of judges and court personnel, throughout 2024 the Supreme Court has organized education and training for 7,269 people, which covers technical competency trainings for 3,027 people and leadership management competency trainings for 4,242 people.

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menyelenggarakan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu bagi 1.456 orang, yang terdiri atas 925 calon hakim peradilan umum, 362 calon hakim peradilan agama, 144 calon hakim peradilan tata usaha negara, dan 25 calon hakim peradilan militer.

In addition, the Supreme Court has also organized an Integrated Judge Candidate Education Program for 1,456 people, consisting of 925 candidates for general court judges, 362 candidates for religious court judges, 144 candidates for state administrative court judges, and 25 candidates for military court judges.

Dalam pengelolaaan data sumber daya manusia tersebut, Mahkamah Agung menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atas keberhasilan melakukan percepatan penyelesaian disparitas data pegawai di lingkungan instansi pusat. Mahakmah Agung juga menerima Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

For its management of human resource data the Supreme Court received an award from the State Personnel Agency for its success in accelerating the resolution of employee data disparities within central institutions. The Supreme Court also received an Award for Merit System Implementation in filling High Ranking Leadership Positions in 2023 from the State Civil Apparatus Commission.

Kedua, Pengelolaan Keuangan. Total pagu anggaran Mahkamah Agung tahun 2024 sebanyak Rp11.925.492.498.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Mahkamah Agung dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp11.597.413.570.618,00 (sebelas triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau 97,25%.

Dalam pengelolaan keuangan, Mahkamah Agung selama 12 tahun berturut-turut meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Ketiga, Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Untuk meningkatkan pelayanan publik dalam kerangka *access to justice*, Mahkamah Agung telah membangun gedung pengadilan baru sesuai amanat undang-undang, yaitu 85 gedung Pengadilan Tingkat Pertama dan 13 gedung Pengadilan Tingkat Banding.

Selain membangun gedung pengadilan, Mahkamah Agung juga mengembangkan sistem teknologi informasi sesuai cetak biru pembaruan peradilan, baik yang berkaitan dengan manajemen perkara (*case management system*) maupun manajamen peradilan lainnya (*court management system*). Pengembangan teknologi informasi di lingkungan badan peradilan, sejalan dengan kebijakan Sistem

Second, Financial Management. The budget ceiling of the Supreme Court in 2024 was Rp11,925,492,498,000.00 (eleven trillion nine hundred twenty five billion four hundred ninety two million four hundred ninety eight thousand rupiah). From such budget the Supreme Court was able to spend Rp11,597,413,570,618.00 (eleven trillion five hundred ninety-seven billion four hundred thirteen million five hundred seventy thousand six hundred eighteen rupiah) or 97.25%.

With regard to financial management, the Supreme Court for 12 consecutive years received an unqualified opinion from the Audit Board of the Republic of Indonesia or BPK. This indicates consistency and a commitment to a transparent and accountable financial management.

Third, Facilities and Infrastructure Management. In order to improve public services to advance access to justice, the Supreme Court has built new court buildings as mandated by law, namely 85 Court of First Instance buildings and 13 Court of Appeal buildings.

In addition to building courthouses, the Supreme Court also developed an information technology system in accordance with the justice reform blueprint, both in relation to case management systems and other court management systems. The development of information technology within the judiciary is in line with the Electronic Based Governance System (SPBE) policy. The Supreme Court has

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mahkamah Agung berhasil meningkatkan indeks SPBE menjadi 3,52 dengan predikat sangat baik.

Sistem teknologi informasi yang dikembangkan tahun 2024 dan memberikan dampak besar terhadap layanan peradilan adalah pengembangan sistem pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Layanan ini disedikan melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, e-Court, dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung, sehingga satu sama lain saling terintegrasi. **Beberapa aplikasi penting yang dikembangkan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024, dapat dilihat di layar.**

1. Aplikasi SIAP MA Terintegrasi
   Aplikasi ini terhubung dengan SIPP di pengadilan tingkat pertama dan dilengkapi fitur Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan. Fitur ini dirancang untuk menghindari konflik kepentingan, terutama dalam proses penunjukan dan distribusi perkara di Mahkamah Agung.
2. Aplikasi e-Court untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali
   Aplikasi ini memungkinkan proses administrasi dan persidangan untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dilakukan secara elektronik. Sejak 1 Mei 2024, seluruh upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sudah menggunakan e-Court, mendukung digitalisasi di semua tingkatan pemeriksaan.

managed to increase its SPBE index to 3.52 with a rating of excellent.

The information technology system developed in 2024 that has a major impact on court services is the development in the system for filing cassation and case review petitions. Delivery of this service augmented by developments made to the Case Tracking Information System, e-Court, and Supreme Court Case Administration Information System applications, causing them to be integrated. **Some of the important applications developed by the Supreme Court throughout 2024, can be seen on the screen.**

1. Integrated SIAP MA Application
   The application is linked to the SIPP at the courts of first instance and features artificial intelligence-based *Smart Majelis*. This feature is designed to avoid conflicts of interests, especially in the assignment and distribution of cases within the Supreme Court.
2. e-Court application for Cassations and Case Reviews
   This application allows the administration and hearing processes for cassation and case review cases at the Supreme Court to be conducted electronically. Since 1st May 2024, all cassation and case review proceedings have been using e-Court, supporting digitalization at all levels of the process.

3. Aplikasi Deteksi Dini (*Early Detection*)
   Aplikasi ini mampu mendeteksi perkara yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan memanfaatkan interkoneksi database perkara di seluruh pengadilan di Indonesia, didukung oleh Sistem Algoritma Robotik. Aplikasi ini bertujuan untuk menghindari adanya putusan-putusan pengadilan yang bertentangan dalam satu sengketa yang sama, yang diajukan oleh para pihak ke beberapa pengadilan sekaligus.
4. Aplikasi JDIH Versi Mobile
   Aplikasi ini merupakan pengembangan dari sistem Jaringan dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung yang kini dapat diakses melalui Playstore dan AppStore. Aplikasi ini memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, termasuk peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, putusan/yurisprudensi, dan dokumen langka.
5. Aplikasi DIKTUM
   Aplikasi ini merupakan Direktori Rumusan Hukum, yang berfungsi sebagai pelengkap dalam pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Aplikasi ini memudahkan akses terhadap rumusan hukum Mahkamah Agung melalui perangkat digital masing-masing.

Keempat, Pengelolaan Organisasi. Mahkamah Agung memiliki 930 satuan kerja yang terdiri dari 7 unit eselon I Mahkamah Agung, dan 923 satuan kerja daerah yang meliputi 416 peradilan umum, 446 peradilan agama, 38 peradilan TUN, dan 23 peradilan militer.

3. Early Detection Application
   This application is able to detect cases that are interrelated by utilizing case database interconnectivity throughout the courts in Indonesia, supported by a robotic algorithm system. The application aims to avoid conflicting judgments made with regard to the same dispute, which may be submitted by the parties with several jurisdictions at once.

4. Mobile version of the JDIH application
   This application is a development of the Supreme Court's Legal Documentation and Network (JDIH) system which can now be obtained through Playstore and AppStore. The software facilitates public access to legal documents published by the Supreme Court, including laws and regulations, legal monographs, legal articles, decisions/jurisprudence, and rare documents.

5. DIKTUM Application
   The application is a directory of legal formulations, serving as a supplement to the electronic assessment of cassation and case review petitions. The application provides ease of access to the Supreme Court's legal formulation by utilizing the digital devices of individuals.

Fourth, Organizational Management. The Supreme Court has 930 work units consisting of 7 echelon I units at the Supreme Court, and 923 regional work units consisting of 416 general courts, 446 religious courts, 38 administrative courts, and 23 military courts.

Dalam rangka mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel, Mahkamah Agung secara konsisten mendukung program nasional reformasi birokrasi, dan mengembangkan standarisasi penjaminan mutu layanan peradilan. Dalam hal pembangunan zona integritas, pada tahun 2024 terdapat 24 unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Dengan demikian, sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 terdapat 16 unit kerja berpredikat WBBM dan 243 unit kerja berpredikat WBK.

Berikut ini Saya tampilkan rangkuman sejumlah **penghargaan yang diraih Mahkamah Agung selama tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam layar**. Penghargaan-penghargaan tersebut mencerminkan dedikasi dan sumbangsih aparatur pengadilan di seluruh Indonesia.

1. Meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023. Ini merupakan penghargaan WTP ke-12 yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
2. Meraih penghargaan Juara II Anugerah Reksa Bandha dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kategori kelompok III Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
3. Menerima Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

In order to establish transparent and accountable organizational governance, the Supreme Court consistently supports the national program of bureaucratic reform, and develops standardization of quality assurance of court services. In terms of integrity zone development, by 2024 there were 24 work units that has obtained the status of Corruption Free Area. Thus, from 2018 to 2024 there are 16 work units with WBBM, or Clean Bureaucracy and Service Oriented area status, and 243 work units that have been designated as Corruption Free Area (WBK).

The following is a summary of the **awards attained by the Supreme Court in 2024, as you can see on the screen**. The awards reflect the dedication and contribution of all court officers throughout Indonesia.

1. Unqualified Opinion given by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) for the Supreme Court's 2023 Financial Statements. This marks the twelfth consecutive unqualified opinion received by the Supreme Court, reflecting its consistence and commitment in managing its finances in a transparent and accountable manner.
2. Second Place for the Anugerah Reksa Bandha Award given by the Directorate General of State Assets (DJKN) of the Ministry of Finance, in the category of Group III: Quality of State Asset Report.
3. Award for the implementation of the merit system in filling High Leadership Positions in 2023, bestowed by the State Civil Apparatus Commission (KASN).

4. Menerima Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Tingkat Lembaga Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kegiatan Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data di Lingkungan Instansi Pusat. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan penyelesaian disparitas data pegawai.
6. Meraih penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat.
7. Menerima penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan prima Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diterima oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang.
8. Meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kualifikasi Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 96,09 dari Komisi Informasi Pusat.
9. Memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 24 satuan kerja yang telah mendapat *clearence* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

4. First Place Award for National Legal Documentation and Information Network (JDIHN) 2024, in the Category of State Institution, bestowed by the Ministry of Law and Human Rights.

5. Award from the State Personnel Agency (BKN) for Data Quality Measurement Instrument and Accelerated Resolution of data Disparities at Central Institutions. The award is a manifestation of appreciation for the success of the Supreme Court in resolving employee data disparities.

6. Public Service Provider Award, in the category of Vulnerable Group-Friendly Public Service Development from the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB) which was received by the West Jakarta Religious Court.
7. Public Service Provider Award in the Excellent Service Category 2024 from the Ministry of State Apparatus Utilization Administrative Reform and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB) received by Military Court III-15 Kupang.

8. Public Information Disclosure Award 2024 for Informative Qualification in the category of State Institutions and Non-Ministerial Government Institutions, with a score of 96.09, from the Central Information Commission.
9. Corruption Free Area status given to 24 work units that have received clearance from the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB).

Bapak Presiden dan hadirin yang Saya muliakan,

Saya menyadari, masih terdapat kinerja yang perlu ditingkatkan, oleh karenanya Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat, Perwakilan Negara Sahabat, Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Penasihat Tim Pembaruan Mahkamah Agung, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pendidikan lainnya, Mitra Perbankan, Taspen, Lembaga-lembaga mitra Mahkamah Agung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi-organisasi Advokat, pihak swasta, dan semua pihak lainnya, yang telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, dan Hakim *Ad-Hoc* pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung beserta jajaran, Sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkat, Para Direktur Jenderal dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung, Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, serta Para Hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia, atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kita mampu meraih capaian-capaian yang sangat membanggakan ini.

Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen,

I fully realize that some of the performances requirement improvements, and as such the Supreme Court is committed to improve itself further from time to time.

I would like to express my gratitude and highest appreciation to the President of the Republic of Indonesia, Chief Justices of the Supreme Courts of Friendly Countries, Representatives of Friendly Countries, State Institutions, Ministries and Non-Ministerial Government Institutions, Advisors of the Supreme Court Reform Team, Local Governments, Universities and other Educational Institutions, Banking Partners, Taspen, Supreme Court partner institutions, both from within the country and abroad, Mass Media, Community Organizations, Non-Governmental Organizations, Bar Associations, the private sector, and all other parties who have contributed in accordance with their respective roles.

I would also like to thank the Leadership of the Supreme Court, Justices and Ad-Hoc Justices of the Supreme Court, the Registrar of the Supreme Court and staff, the Secretary of the Supreme Court and all apparatus, the Directors General of the 4 (four) branches of the judiciary, Heads of Agencies of the Supreme Court, Chairpersons of the First Instance and Appellate Courts, and all judges and members of the judicial community throughout Indonesia, for their hard work and sincere dedication in carrying out their duties, that has allowed us to be able to achieve these achievements that we are very proud of.

Selanjutnya, Saya mohon perkenan Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk menyampaikan pidato kepada keluarga besar Mahkamah Agung dan warga peradilan, yang hadir secara langsung dan virtual di seluruh Indonesia.

Untuk mengakhiri pidato ini, perkenankan Saya menyampaikan pesan kepada seluruh warga peradilan, yaitu: **"Pribadi berintegritas menciptakan peradilan berkualitas, peradilan berkualitas menciptakan keadilan."**

Demikian penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024. Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam menjalankan amanah. *Aamiin ya robbal'alamin.*

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq,
Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Jakarta, 19 Februari 2025

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Further, I would like to respectfully invite the President of the Republic of Indonesia to deliver his remarks to the Supreme Court and the entire judiciaries who are with us today physically as well as by virtual means from all over Indonesia.

As a conclusion of this remarks, please allow me to convey a message to all members of the judicial community: **"Persons with integrity create quality judiciary, quality judiciary creates justice."**

I hereby conclude my presentation on the Supreme Court's 2024 Annual Report. It is my hope that God the Almighty, Allah swt., continues to bless us with strength and protection to allow us to carry out our mandate. *Aamiin ya robbal'alamin.*

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq,
Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Jakarta, 19th February 2025

CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

SUNARTO

Mahkamah Agung Republik Indonesia
The Supreme Court of the Republic of Indonesia

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
persuratan@mahkamahagung.go.id